

Peran Indonesia Dalam Dinamika Proliferasi Nuklir Dunia

Ainur Rizqi Mubarrok^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Universitas Jember

*sayarizqi22@gmail.com

Abstract. Artikel ini membahas tentang dinamika proliferasi nuklir di dunia. Mengingat pasca perang dunia ke-II negara-negara dunia turut mengembangkan nuklir dengan tujuan politik luar negeri demi kepentingan nasionalnya. Penelitian kualitatif mencoba memaparkan penjelasan penjelasan, dan berbagai informasi lain seputar topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa sumber cetak seperti buku, jurnal, artikel, laporan tertulis, situs internet dan sebagainya. Hasil yang dijelaskan dalam artikel ini membuktikan bahwa nuklir menjadi kebijakan strategis bagi negara-negara dunia yang meliputi keamanan nasional dan kebutuhan masyarakat. Selain itu nuklir juga menjadi instrument dalam diplomasi antar negara. Dinamika proliferasi yang terjadi di dunia tidak terlepas dari kepentingan amerika yang berupaya untuk mendominasi negara dunia, hal ini dibuktikan dengan ketegangan yang terjadi Antara amerika dan beberapa negara seperti iran. Indonesia yang menjadi bagian dunia memiliki sikap non-proliferasi dengan meningkatkan keterlibatannya dalam forum-forum damai internasional.

1. Pendahuluan

Perang dunia ke II diakhiri dengan kekalahan negara jepang atas kehancuran hirosima dan Nagasaki melalui penjatuhan bom nuklir yang mengagetkan dunia. Pasalanya, senjata nuklir pertama kali digunakan amerika serikat untuk meluluhlantahkan negara matahari terbit tersebut. Hal ini dikarenakan dampak kerusakan dan korban yang ditimbulkan oleh senjata nuklir sangat berlimpah. Pasca Perang Dunia II, dunia memasuki sebuah periode baru, yaitu atomic age. Periode ini ditandai dengan saling berlombanya negara-negara dunia dalam mengembangkan teknologi nuklir, baik untuk keperluan damai maupun militer.

Pada periode ini pula, muncul dua negara adidaya, sebagai pemenang perang dan pemimpin blok politik-ideologis yang saling bertentangan, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya melancarkan perang yang tak kasat mata, namun juga tidak tertutup sama sekali kehadirannya, yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang yang tak kasat mata ini sejatinya merupakan unjung kebolehan ideologi, ekonomi, dan politik antara kapitalisme yang diwakili oleh Amerika Serikat dan komunisme yang diwakili oleh Uni Soviet. Di gelanggang, terjadi perlombaan pengembangan senjata, sebagai upaya perimbangan kekuatan sekaligus penguatan instrument pertahanan dan keamanan masing-masing negara.

Saat ini sesungguhnya telah terdapat sejumlah perjanjian internasional yang mengatur tentang nuklir, seperti misalnya: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT), Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free-Zone dan perjanjian nuklir regional lainnya. Ketika Korea Utara memutuskan keluar dari Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons, terjadi peningkatan ketegangan dunia menyangkut penggunaan senjata nuklir (Budi et al., 2017).

Perjanjian NPT tidak berjalan secara efektif untuk menghentikan atau mencegah proliferasi senjata nuklir. Dalam hal ini, NPT sebagai suatu instrumen hukum internasional dapat dinyatakan gagal karena tidak mencapai hasil yang optimal karena pada saat ini masih terdapat banyak negara yang terus melanjutkan program pengembangan senjata nuklir mereka. Di satu sisi terlepas dari kegagalan NPT, eksistensi NPT menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengendalian dan pembatasan kepemilikan senjata nuklir terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Indonesia sebagai bagian dari kehidupan dunia secara tidak langsung ikut serta dalam dinamika tersebut. Disisi lain, sebagai amanah UUD NRI 1945 meneguhkan bahwa negara Indonesia turut berperan aktif dalam kedamaian dunia. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana peran Indonesia dalam merespon dinamika proliferasi nuklir dunia dalam misi stabilitas dunia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa peran Indonesia dalam keterlibatan menciptakan perdamaian dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni memberikan penjelasan secara deskriptif naratif dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (literature research), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta sumber elektronik, setelah itu teori yang ada disesuaikan dengan permasalahan yang ditulis.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Dinamika nuklir dunia

Strategi nuklir negara-negara adikuasa dewasa ini cukup rumit dan mengandung kecemasan-kecemasan mengenai tidak pastinya jaminan keamanan dan perdamaian internasional di masa depan. Terutama dalam konteks keamanan dan perdamaian internasional ini, masyarakat manusia dibayangi ketakutan bila perang nuklir pecah, efek-efeknya yang dahsyat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat mengerikan (Sutopo, 2004) Akan tetapi ketakutan itu tidak secara otomatis mendorong secara sungguh-sungguh pemusnahan jenis-jenis persenjataan nuklir dari jajaran kekuatan negaranegara di dunia. Sebaliknya, malahan terdapat pertanda bahwa sejak pertama kali jenis persenjataan ini dikenal, selama empat dasawarsa terakhir ini jumlah negara yang menguasainya makin bertambah walaupun perkembangannya relatif sangat lambat. Beberapa negara yang telah mengembangkan senjata nuklir termasuk Amerika Serikat, Rusia, Iran, Tiongkok, Inggris, Prancis, India, Pakistan, dan Korea Utara.

Pasca ledakan Hiroshima dan Nagasaki, Uni Soviet mengalokasikan dana yang lebih pada program pengembangan senjata nuklirnya. Pada tanggal 29 Agustus 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba pertama senjata nuklirnya di Semipalatinsk, Kazakhstan. Dengan berhasilnya uji coba ini, Uni Soviet menjadi negara kedua yang sukses mengembangkan senjata nuklir. Tidak diragukan lagi, bahwa penguasaan teknologi nuklir merupakan langkah strategis bagi pengembangan dan kemajuan sebuah negara.

Iran sebagai negara yang memiliki komitmen perjuangan dalam menentang hegemoni negara-negara barat sebagai kebijakan politik luar negerinya. Kebijakan politik luar negeri yang diambil Iran adalah mengembangkan nuklir sebagai kekuatan negaranya, tidak hanya dalam bidang kebutuhan rakyat, akan tetapi juga mengembangkan sebagai senjata perangnya. Hal ini dilakukan untuk membela kepentingan politik luar negeri Iran. Iran telah memiliki infrastruktur yang lengkap. Berdasarkan data IAEA, pada November 2009 Iran sudah berhasil mengumpulkan 1763 kilogram uranium yang diperkaya. Pada 29 November 2009, Iran bahkan berencana untuk membuat tempat pemerkaya uranium. Sebenarnya, Iran bisa saja bekerjasama dengan IAEA jika tidak ada tekanan apapun dari Barat. Akan tetapi, dengan dalih bahwa Amerika Serikat terus memprovokasi IAEA dan PBB untuk melenyapkan nuklir Iran, Ahmadinejad terus mempersiapkan senjatanya. Perhitungan David Albright dan Corey Hinderstein dari ISIS pada 12 Januari 2006 menyatakan bahwa bom nuklir Iran sudah siap pada tahun 2009. (Fatoni, 2019)

Pengembangan nuklir di Iran menjadi pandangan lain bagi Amerika Serikat dan Israel, hal ini dianggap bahwa dengan pengembangan nuklir di Iran akan mengancam dominasi Amerika Serikat dan Israel di timur tengah yang selama ini . Bagi AS, sejarah hubungan permusuhan dengan Iran menjadi dasar kekhawatiran AS terhadap Iran apabila berhasil memiliki senjata nuklir. Bagi Israel, kebangkitan nuklir Iran apabila memiliki senjata nuklir akan menjadi pesaing dan dominasi Israel di wilayah Timur Tengah. Maka untuk menghindari adanya pesaing kekuatan regional, maka Israel menuntut AS untuk bersikap agresif kepada pengembangan nuklir Iran. Hal ini karena dapat membahayakan posisi Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki 200 lebih nuklir. (Sundari, 2020)

Sejauh ini Rusia merupakan negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang dekat dengan Iran dibandingkan dengan negara lainnya di Eropa. Hubungan Rusia-Iran sudah mulai terlihat dari adanya bantuan Rusia dalam program nuklir Iran. Bantuan yang diberikan berupa teknologi dan tenaga ahli. Tanpa bantuan dari Rusia, Iran tidak bisa menjalankan program nuklirnya. INF Treaty menjadi kerja sama yang krusial dalam menjaga stabilitas keamanan khususnya dikawasan Euro-Atlantik selama bertahun-tahun. Perjanjian ini mendorong beberapa negara untuk melucuti senjata nuklir jarak menengahnya. Seiring berjalannya waktu, Rusia sebagai pewaris utama Uni Soviet, mulai menunjukkan minatnya untuk keluar dari perjanjian ini di tahun 2007 (Ardiansyah et al., 2023). Sejarah terbentuknya Intermediate Nuclear Forces Treaty (INF Treaty) menjelaskan bahwa negara bertindak untuk melayani keamanan nasionalnya. Namun, berubahnya tatanan internasional membuat perjanjian tersebut tidak lagi melayani kepentingan Rusia. Eksploitasi bagian abu-abu oleh Amerika Serikat, dan penyebaran sistem pertahanan misil di Eropa, serta munculnya negaranegara tetangga Rusia yang telah mengembangkan senjata nuklir menempatkan Rusia berada dalam posisi sulit. (Mahdi, 2016)

Disisi lain, saat ini Korea Utara menjadi negara yang terkenal dengan senjata nuklirnya. Meskipun pada awalnya, tujuan pengembangan reactor nuklir di Korut ditujukan untuk penelitian. Namun seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, maka Korea Utara pun menggunakan teknologi nuklir yang dimilikinya sebagai alat diplomasi, yakni berupa sebuah bentuk diplomasi koersif dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya. Jadi dapat kita lihat bahwa kepentingan nasional Korea Utara atau tujuannya dengan memiliki nuklir (P. & Z, 2010) yaitu:

- 1) Menjaga keamanan rejim Korea Utara, karena pada umumnya Pyongyang menganggap Washington sebagai ancaman utama di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat pun akhirnya mengawasi Korea Utara sebagai negara pendukung teroris.
- 2) Dengan kepemilikan senjata nuklir, Korea Utara akan memilikiposisi unggul dalam negosiasi di dalam percaturan internasional, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Keamanan rejim bisa Korea Utara dicapai sempurna melalui perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat.
- 3) Memenuhi kebutuhan sumber daya negaranya, dengan adanya nuklir yang dimilikinya maka ketika ia diminta untuk menutupnya dan menyetujuinya, Korut akan diberikan imbalan berupa pasokan solar yang sangat banyak ataupun pencabutan sanksi-sanksi ekonomi.

b. Peran Indonesia Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia

Sejak berdirinya negara Indonesia, Indonesia mengambil sikap bebas aktif sebagai garis politik luar negeri. Pemerintah Indonesia memadukan politik bebas aktif dengan politik bertetangga baik yang ditonjolkan dalam berhubungan dengan negara-negara tetangga, yang memiliki pandangan yang sama mengenai politik internasional menyangkut Perang Dingin. Sementara itu, di dalam negeri, keseimbangan politik dan ekonomi juga menjadi permasalahan tersendiri. Bahkan, pada periode 1950an, terjadi perubahan sistem pemerintahan, dari Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin . (Sylvia, 2021)

Perkembangan teknologi nuklir di Republik Rakyat Cina (RRC) telah memengaruhi pandangan Sukarno terhadap arah perkembangan teknologi nuklir selanjutnya di Indonesia. Pada Kongres Muhammadiyah di Bandung, 24 Juli 1965, Sukarno menyampaikan pidato yang pada intinya dalam Waktu dekat Indonesia akan memiliki senjata nuklir. Dalam pidatonya, Sukarno berusaha memacu kemandirian produksi dan ekonomi Indonesia, yang dikenal dengan istilah berdikari. Selain itu, Sukarno juga menyinggung tentang kemandirian Indonesia dalam memproduksi senjata. Pernyataan Sukarno tersebut menjadi indikasi terjadinya perubahan orientasi pengembangan nuklir di Indoensia, yang semula untuk maksud perdamaian (atoms for peace) menjadi kepentingan pertahanan militer. Sejak 1958, pengembangan teknologi nuklir yang diperjuangkan oleh Sukarno adalah untuk perdamaian. Namun, landasan perdamaian dan kemerdekaan yang bebas dari senjata nuklir tidak kunjung terealisasi. Baginya, imperialisme dan senjata nuklir adalah kombinasi dan musuh bersama yang harus dilawan oleh negara-negara yang cinta kedamaian. Maka dari itu, baginya, kepemilikan senjata nuklir adalah hal yang mutlak. (Sylvia, 2021)

Peristiwa September 1965 telah menandai perubahan politik Indonesia yang semakin bergeser ke arah kanan. Bahkan, terjadi dualism kepemimpinan antara Presiden Sukarno dan Jenderal Suharto yang dianggap berhasil menumpas G30S. Sebagai pungkasan, pada 11 Maret 1966, kekuasaan Sukarno sebagai presiden resmi berakhir. Dalam pemerintahan Suharto yang anti komunis, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara komunis resmi berakhir. Hubungan diplomatik dengan RRC dibekukan terhitung 30 Oktober 1967. Hal ini menandai berakhirnya ambisi kepemilikan nuklir yang dicitakan Suakrno untuk menandingi negara-negara imperialis Barat, karena tak relevan dengan pemerintahan Suharto. Pada 19 Juni 1967, pemerintahan Suharto menandatangani perjanjian keamanan yang diselenggarakan IAEA. Persetujuan keamanan tersebut berkomitmen agar teknologi nuklir digunakan untuk maksud damai yang sedang berlangsung.(Sylvia, 2021)

Peran Indonesia dalam dinamika non-proliferasi dan pengendalian senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya dapat dilihat dari Indonesia secara konsisten menggunakan diplomasi aktif untuk mempromosikan tujuan non-proliferasi dan pengendalian senjata. Negara ini terlibat dalam berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan ASEAN Regional Forum (ARF) untuk memperjuangkan kebijakan non-proliferasi dan perdamaian global. Indonesia sering kali berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang berpotensi memicu proliferasi senjata. Contohnya adalah peran Indonesia dalam mediasi konflik di kawasan seperti konflik di Semenanjung Korea dan konflik Laut Cina Selatan. Indonesia telah meratifikasi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan Perjanjian Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT), serta mendukung Perjanjian Pelucutan Senjata Nuklir (START) dan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Biologi dan Kimia. Dengan demikian, Indonesia menunjukkan komitmen aktifnya terhadap upaya internasional untuk mengendalikan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Indonesia juga terlibat dalam kerja sama teknis dengan badan internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap bahan-bahan nuklir dan fasilitas nuklir di negara ini. Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal melalui pendidikan dan kampanye publik. Secara keseluruhan, peran Indonesia dalam dinamika non-proliferasi dan pengendalian senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya mencakup diplomasi aktif, mediasi konflik, keikutsertaan dalam perjanjian internasional, kerja sama teknis, dan upaya pendidikan masyarakat.

4. Kesimpulan

Proliferasi senjata nuklir di dunia menjadi dinamika yang serius pasca Amerika Serikat meluluhlantahkan Jepang melalui bom atomnya saat terjadinya perang dunia ke II. Era baru yang muncul setelah meletusnya perang dunia ke-II ditandai dengan era atom age, dimana negara-negara besar seperti Uni Soviet juga mengembangkan senjata berbasis nuklir dengan tujuan keamanan negara. Hal ini diikuti negara-negara lain seperti Iran, Cina, Korea Utara, Inggris serta Israel juga mengembangkan nuklir di negaranya untuk kepentingan nasional. Dalam perkembangannya, negara-negara yang memiliki nuklir memiliki catatan keterlibatan Amerika Serikat dalam proses pengembangan nuklir tersebut. Keterlibatan yang dimaksud adalah upaya pencegahan agar Amerika menjadi satu-satunya negara yang memiliki dominasi militer di dunia. Keterlibatan Amerika tersebut bisa dicontohkan dari konflik internasional yang terjadi selama ini seperti Iran dan Amerika, Korea Utara dan Amerika, serta Amerika dan Rusia yang menjadikan ketegangan dunia dalam bidang keamanan internasional.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sikap non-proliferasi, menjadikan negara Indonesia yang turut menciptakan perdamaian dunia terus berperan aktif dalam aktivitas perdamaian dunia melalui dialog dan diplomasi antar negara. Dengan tujuan agar ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak sampai pada peperangan besar yang juga akan mengganggu stabilitas dunia.

References:

- [1] Ardiansyah, R. F., Ratih, P. K. D., & Surya, A. A. B. W. N. (2023). Alasan Rusia Mengembangkan Senjata Nuklir Jarak Menengah (Intermediate Nuclear Forces). *Jurnal Dikshi*, 02, 398–412.
- [2] Budi, D., Tuni, P., & Arsika, B. (2017). Legalitas Pengancaman dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional. *Program Kekhususan Hukum Internasional Dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1, 1–5.
- [3] Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064>
- [4] Mahdi, I. (2016). Analisa kebijakan amerika serikat, cina, dan rusia dalam kesepakatan nuklir iran. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1(1), 75–89.
- [5] P., A., & Z, A. S. (2010). Peran nuklir korea utara sebagai instrumen diplomasi politik internasional. *Ilmu Hubungan Internasional*, 7(2), 1–19.
- [6] Sundari, R. (2020). Strategi Amerika Serikat dalam Menekan Pengembangan Nuklir Iran. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1(2), 314–340.
<https://doi.org/10.25077/fetrian.1.2.314-340.2019>
- [8] Sutopo, A. R. (2004). Proliferasi Nuklir dan Permasalahannya. *Thematy. Revista de Filosofia*, 33, 369–374.
- [9] Sylvia, D. (2021). Politik Nuklir di Indonesia Masa Sukarno, 1958-1967. *Lembaran Sejarah*, 17(1), 114. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.69971>